



Jika Mediasi Ahok – DPRD Buntu DKI Gunakan APBD 2014

JAKARTA (Pos Kota) – Pemprov DKI Jakarta siap gunakan APBD 2014. Langkah ini dilakukan jika mediasi dengan DPRD terkait kisruh APBD 2015 buntu.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan semua pihak berkeinginan agar kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini cepat berakhir. Dengan demikian pembangunan di ibukota bisa dijalankan. Dipastikan DKI akan tetap menggunakan sistem e-budgeting, sesuai yang diinginkan Gubernur Ahok.

"Kalau berjalan baik, setuju, maka keluar Perda APBD 2015. Setelah itu bisa jalan. Tapi kalau deadlock (buntu) DKI akan bersurat ke Kemendagri bahwa ini deadlock dan gubernur buat pergub tentang penggunaan APBD 2014 dengan persetujuan Mendagri," kata Saefullah, di Kantor Kemendagri, Rabu (4/3).

Saefullah menjelaskan Kemendagri memiliki waktu hingga 13 Maret untuk mengeluarkan surat keputusan persetujuan. Selanjutnya DKI dengan DPRD memiliki waktu selama tujuh hari untuk melakukan kesepakatan.

Jika dalam jangka waktu tujuh hari tersebut tidak ditemukan kesepakatan atau deadlock maka terpaksa akan dikeluarkan peraturan gubernur (pergub) yang menyatakan penggunaan APBD 2015, setinggi-tingginya sama seperti APBD 2014 yakni Rp72,9 triliun.

Dia menyebutkan penggunaan APBD 2014 ini tidak berpengaruh terhadap pembangunan Jakarta. Sebab hanya nilainya saja yang sama, sementara untuk jenis kegiatannya disesuaikan dengan yang telah disusun pada 2015 ini.

"Nilainya merujuk kepada tahun yang lalu, program-programnya nanti kita sesuaikan," ucapnya.

DENGARKAN PENJELASAN

Seperti diketahui Kemendagri telah memanggil eksekutif dan DPRD untuk mediasi. Mereka juga telah melihat draft APBD 2015 sebesar Rp73 triliun versi eksekutif yang sangat berbeda dengan APBD versi DPRD yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna pada 27 Januari.

Kehadiran kedua lembaga pemerintah daerah ini dilakukan secara terpisah. Karena Kemendagri ingin mendengarkan penjelasan dan informasi secara utuh tentang APBD 2015.

Wakil Ketua Panitia Angket DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, mengatakan pertemuan dengan Dirjen Keuangan Kemendagri kemarin bersifat informal. Pihaknya hanya ingin menjelaskan duduk perkara dari polemik APBD yang telah terjadi.

"Kami ingin dimediasi Kemendagri terkait pengesahan APBD 2015. Karena kalau kedua belah pihak mau menang-menangan yang rugi masyarakat," kata Inggard.

(guruh/joko/john/st/o)